SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 80 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat serta pihak terkait, perlu dilakukan penyempurnaan standar layanan yang meliputi standar pelayanan permohonan informasi publik, standar pendidikan pemilih, standar pelayanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik, standar pelayanan pencalonan peserta pemilih/pemilihan, standar pelayanan pemutakhiran data pemilih, standar pelayanan kerja sama, dan standar pelayanan pengaduan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

jdih.kpu.go.id/sulbar/majene

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

jdih.kpu.go.id/sulbar/majene

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/sulbar/majene

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

KEDUA : Menetapkan beberapa Standar Pelayanan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran-Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, adalah:

1. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih;
3. Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik;
4. Standar Pelayanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan;
5. Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih;
6. Standar Pelayanan Kerjasama;
7. Standar Pelayanan Pengaduan Mayarakat.

jdih.kpu.go.id/sulbar/majene

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perlunya penyempurnaan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 80 TAHUN 2026
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1	Persyaratan	1. Perseorangan: Fotokopi atau hasil pindai Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemohon informasi; Badan Publik : Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia secara langsung maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan dibantu oleh petugas.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung atau surat elektronik melalui e-PPID.
3	Jangka waktu pelayanan	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (Dua) hari keria disertai alasan; 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja disertai alasan; 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4	Biaya/tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen *hardcopy* maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5	Produk Pelayanan	Informasi dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan ini dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran sesuai mekanisme keberatan informasi yang dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia pada e-PPID Kantor KPU Kabupaten Majene di Jln Jend. Ahmad Yani, Lingkungan Passarang, Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene; 2. Pengajuan keberatan informasi melalui Website Resmi e-PPID KPU Kabupaten Majene *https://majenekabppid.kpu.go.id/* 3. Website: https://kab-majene.kpu.go.id/ 4. Instagram: kpu_majene 5. Facebook: KPU Kabupaten Majene 6. Youtube: @kpukabupatenmajene Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila ppengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN *(MANUFACTURING)*		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas pelayanan; 4. Mekanisme pelayanan; 5. Jadwal pelayanan; 6. Alat tulis; 7. Komputer; 8. Printer dan scanner; 9. Internet; 10. Jalur landai *(Ramp)* bagi penyandang disabilitas; 11. Kursi roda bagi disabilitas.
3	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 35 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Umum Kabupaten Majene Tahun 2026 berjumlah 5 (lima) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; 2. Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan/pemilih (Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga); 3. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV; 4. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 80 TAHUN 2026
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1	Persyaratan	1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum melalui surat resmi yang ditandatangani pimpinan organisasi/institusi; 2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan; 3. Jumlah peserta menyesuaikan dengan kebutuhan pemohon layanan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran; 4. Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan pendidikan kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 10, Lingkungan Passarang, Totoli, Kec. Banggae, Kabupaten Majene, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawab serta mencantumkan narahubung yang dapat dihubungi; 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan pendidikan kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
3	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan layanan pendidikan kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 1 (satu) hari atau setara dengan 8 jam pelajaran.
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan.
5	Produk Pelayanan	1. Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kabupaten Majene; 2. Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene; 3. Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene; 4. Masing-Masing pelaksanaan kegiaitan adalah 8 jam pelajaran x 45 menit/hari.
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan ini dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kabupaten Majene di Jln Jend. Ahmad Yani No. 10 Lingkungan Passarang, Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene; 2. Website: https://kab-majene.kpu.go.id/ 3. Instagram: kpu_majene 4. Facebook: KPU Kabupaten Majene 5. Youtube: @kpukabupatenmajene Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila ppengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN *(MANUFACTURING)*		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

NO	KOMPONEN	URAIAN
		telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretraiat Komis Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KomisI Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Pperaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Ppemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentamg Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya. 2. Layanan pendidikan pemilu bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang mudah diakses/ dilaksanakan di lantai dasar.
3	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
4	Pengawasan Internal	Dalam setiap pelaksanaan layanan pendidikan pemilih akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dan 6 (enam) orang perwakilan anggota KPU Kabupaten Majene. Serta 6 (enam) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Kegiatan layanan pendidikan pemilih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentiikan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Kegiatan layanan pendidikan pemilih difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan; 4. Materi Layanan Pendidikan Pemilih dan Kepemiluan; 5. Kegiatan layanan pendidikan pemilih dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel; 6. Apabila pelayanan, tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksanaan di pintu masuk yang siaga 24 jam nonstop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alaram kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan pemadam kebakaran dan alat pengeras suara atau TOA.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan di setiap akhir pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene; 3. Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 80 TAHUN 2026
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1	Persyaratan	1. Partai Politik telah terdaftar dan/atau berstatus sebagai calon Peserta Pemilu sesuai dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum; 2. Menyampaikan dokumen kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor Partai Politik tingkat provinsi sesuai dengan format Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik menginput dan menyampaikan data kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol); 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene melakukan verifikasi administrasi terhadap data yang disampaikan; 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene melakukan verifikasi faktual apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum; 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menyampaikan hasil verifikasi kepada Partai Politik untuk ditindaklanjuti dan/atau diperbaiki; 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene memutakhirkan data Partai Politik secara berkala sesuai dengan perubahan kepengurusan dan/atau keanggotaan.
3	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan jadwal tahapan verifikasi Partai Politik yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Berita Acara dan/atau Keputusan hasil verifikasi dan pemutakhiran data Partai Politik *(hardcopy dan softcopy).*

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan ini dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kabupaten Majene di Jln Jend. Ahmad Yani No. 10 Lingkungan Passarang, Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene; 2. Website: https://kab-majene.kpu.go.id/ 3. Instagram: kpu_majene 4. Facebook: KPU Kabupaten Majene 5. Youtube: @kpukabupatenmajene Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila ppengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN *(MANUFACTURING)*		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), komputer, jaringan internet, printer, dan scanner.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kepartaian dan verifikasi Partai Politik; 2. Teliti dalam melakukan pemeriksaan dokumen kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik, serta menguasai aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan; 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Partai Politik sebagai pengguna layanan dan diadministrasikan.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 80 TAHUN 2026
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PENCALONAN PESERTA PEMILU/PEMILIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1	Persyaratan	1. Bakal calon Peserta Pemilu/Pemilihan (Partai Politik, pasangan calon, dan/atau perseorangan) memenuhi sarat pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2 Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan secara lengkap sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik/pasangan calon/perseorangan mengajukan dokumen pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan/atau secara manual sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan; 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pencalonan; 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pencalonan; 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menyampaikan hasil verifikasi kepada Partai Politik/ pasangan calon/ perseorangan untuk dilakukan perbaikan apabila diperlukan; 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menetapkan Partai Politik/ pasangan calon/ perseorangan sebagai Peserta Pemilu/Pemilihan melalui rapat pleno terbuka.
3	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan jadwal dan tahapan pencalonan yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Peserta Pemilu/Pemilihan (*hardcopy* dan *softcopy*).
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan ini dapat disampaikan melalui:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kabupaten Majene di Jln Jend. Ahmad Yani No. 10 Lingkungan Passarang, Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene; 2. Website: https://kab-majene.kpu.go.id/ 3. Instagram: kpu_majene 4. Facebook: KPU Kabupaten Majene 5. Youtube: @kpukabupatenmajene Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila ppengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN *(MANUFACTURING)*		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai pencalonan Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berlaku.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Sistem Informasi Pencalonan (Silon), komputer, jaringan internet, printer, scanner, dan ruang penerimaan dokumen pencalonan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan; 2. Teliti dan cermat dalam memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan, serta menguasai aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang membidangi Divisi Hukum dan/atau Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjunjung prinsip keterbukaan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan; 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Partai Politik/pasangan calon/perseorangan sebagai pengguna layanan dan diadministrasikan.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 80 TAHUN 2026
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1	Persyaratan	1. Form permohonan layanan; 2. KTP Elektornik.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID; 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal *cekdptonline.kpu.go.id*
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan Data Pemilih dapat disampaikan melalui: Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan ini dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kabupaten Majene di Jln Jend. Ahmad Yani No. 10 Lingkungan Passarang, Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene; 2. Website: https://kab-majene.kpu.go.id/ 3. Instagram: kpu_majene 4. Facebook: KPU Kabupaten Majene 5. Youtube: @kpukabupatenmajene Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila ppengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN *(MANUFACTURING)*		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomr 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman *www.cekdptonline.kpu.go.id*
3	Kompetensi Pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4	Pengawasan Internal	1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majene 2. Sekretaris KPU Kabupaten Majene; dan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Majene.
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang staf pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada wilayah Kabupaten Majene sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan, sepanjang memenuhi syarat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 80 TAHUN 2026
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1	Persyaratan	a. KPU Kabupaten Majene menyampaikan surat permohonan usulan kerja sama kepada mitra; atau b. Mitra kerja sama menyampaikan surat permohonan usulan kerja sama kepada Ketua KPU Kabupaten Majene; c. Mitra Kerja Sama meliputi: 1. Instansi vertikal pemerintah pusat; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Majene; 3. Perguruan tinggi yang terakreditasi; dan 4. Pihak lain yang terkait di bidang kepemiluan. c. Syarat administrasi Pihak Mitra Keria Sama meliputi: 1) Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk Mitra Perguruan Tinggi; 2) Surat Keterangan terdaftar sebagai Organisasi Masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Majene yang berwenang untuk Lembaga Sosial Masyarakat setempat; dan 3) Surat Keterangan dari Kementerian/ Lembaga/Instansi setempat yang relevan untuk Mitra Kerja Sama lain yang terkait di bidang kepemiluan. d. Jam pelayanan adalah: 1) Senin sampai dengan Kamis pikil 08.00 – 15.30 WITA; dan 2) Jumat pukul 08.00 – 16.00 WITA.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Majene No 28 Tahun 2026 tentang SOP Perencangan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan Lembaga Instansi Lain Tahun 2026.
3	Jangka waktu pelayanan	Tindak lanjut permohonan kerja sama (mekanisme non tahapan) 1. Perjanjian Kerja sama: 7 (Tujuh) hari kerja; 2. Nota Kesepahaman: 7 (Tujuh) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan KPU RI.
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Nota Kesepahaman.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan ini dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kabupaten Majene di Jln Jend. Ahmad Yani No. 10 Lingkungan Passarang, Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene; 2. Website: https://kab-majene.kpu.go.id/ 3. Instagram: kpu_majene 4. Facebook: KPU Kabupaten Majene 5. Youtube: @kpukabupatenmajene Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila ppengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN *(MANUFACTURING)*		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provirisi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umtim Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja *helpdesk* pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas *helpdesk* pelayanan 4. Mekanisme pelayanan; 5. Jadwal pelayanan; 6. Alat tulis; 7. Komputer; 8. Printer dan scanner; 9. Toilet umum; 10. Area parkir; 11. Internet; 12. Jalur landai *(Ramp)* bagi penyandang disabilitas
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Kerja Sama; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service.
4	Pengawasan Internal	1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majene 2. Sekretaris KPU Kabupaten Majene; dan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Majene.
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang pegawai KPU Kabupaten Majene per hari yang mempunyai kompetensi di bidang kerja sama.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, tepat waktu, tidak diskriminatif, dan sesuai ketentiian peraturan perundang-undangan. Pelayanan mengutamakan kepastian prosedur, ketepatan waktu, kemudahan akses, keamanan informasi, serta ke uasan pengguna layanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan/ pemilih (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga); 3. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV; 4. Tersedianya jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap semester. Selanjutnya, dilakukan tindakan perbaikan jika diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 80 TAHUN 2026
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1	Persyaratan	1. Identitas Pelapor (Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Nomor Handphone/WhatsApp aktif); 2. Bukti/dokumen pengaduan.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; 2. Mengisi formulir pengaduan; 3. Mengisi Buku Register; 4. Memperoleh tanda bukti konsultasi; 5. Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	*Hardcopy* dan *softcopy* produk hukum yang diarsipkan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan ini dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kabupaten Majene di Jln Jend. Ahmad Yani No. 10 Lingkungan Passarang, Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene; 2. Website: https://kab-majene.kpu.go.id/ 3. Instagram: kpu_majene 4. Facebook: KPU Kabupaten Majene 5. Youtube: @kpukabupatenmajene Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila ppengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN *(MANUFACTURING)*		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provirisi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki sikap ramah, murah senyum; 2. Memiliki Pengetahuan terkait Proses pelayanan pengaduan masyarakat.
4	Pengawasan Internal	Sekretaris KPU Kabupaten Majene memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung, pemadam kebakaran, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan; 3. Sistem pengamanan jaringan Komputer.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Masyita Machmud